

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (E-KTP) DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO**

Oleh :

RAMDAN B. AMADU
S2120015

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEREKAMAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA GORONTALO**

OLEH

**RAMDAN B. AMADU
NIM. S2120015**

SKRIPSI

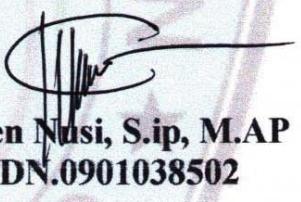
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Menyetujui

Pembimbing I


**Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN.0913078602**

Pembimbing II


**Marten Nusi, S.ip, M.AP
NIDN.0901038502**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**


**Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN.0930048307**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEREKAMAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA GORONTALO**

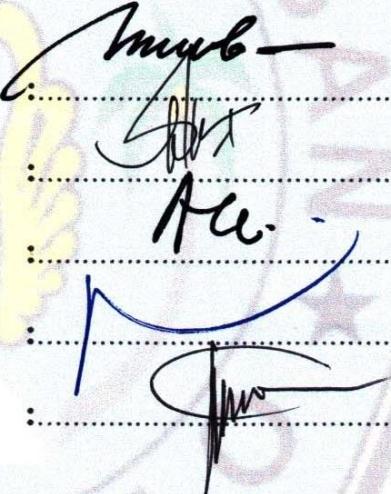
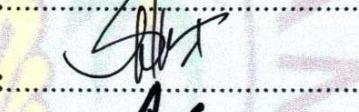
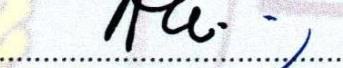
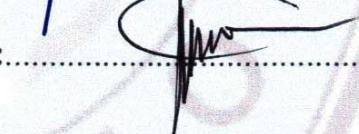
OLEH

**RAMDAN B. AMADU
NIM. S2120015**

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan di setujui
Oleh tim penguji Pada Tanggal 13 Desember 2024

Komisi Penguji:

1. Dr. Bala Bakri, S.IP., S.E., S.Psi.,MM : 
2. Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP : 
3. Balada Raff, S. PIP., M.Si : 
4. Dr. Arman S.Sos., M.Si : 
5. Marten Nusi, S.IP., M. AP : 

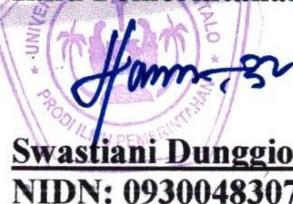
Mengetahui:

**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913078602

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN: 0930048307

Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN: 0926096601

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RAMDAN B. AMADU

NIM : S2120015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul " Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KKTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil" adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Penyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



DF1C6AMX112289040

Ramdan B. Amadu

ABSTRAK

RAMDAN B. AMADU. S2120015. ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO

Penelitian ini menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam perekaman e-KTP di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah analisis interasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perekaman e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo bahwa partispasi yang terlihat dalam fakta penelitian, dimana masyarakat turut serta dalam memberikan ide tau gagasan yang teraktualisasikan dalam bentuk saran dan pendapat yang diberikan kepada pihak Dinas Dukcapil. Dimana saran dan pendapat itu berupa harapan yang disampaikan kepada Dinas Dukcapil agar terus melakukan upaya edukaasi secara massif yang dapat memberikan kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP sebagai wujud dari kepedulian atas identitas kependudukan mereka yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, selain itu partisipasi juga terkihat pada saat pengurusan langsung e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo. Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah pentingnya kebijakan yang sifatnya dapat merubah pemikiran masyarakat tentang pentingnya identitas kependudukan e-KTP yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Dukcapil melalui kegiatan-kegiatan intens langsung kemasyarakatan, baik dalam bentuk sosialisasi atau pendampingan secara langsung layanan pengurusan e-KTP dalam artian melakukan pola jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat yang belum melakukan peremakan e-KTP, serta mengupayakan pembukaan layanan peerekaman e-KTP langsung dilingkungan masyarakat dengan system layanan berjalan yang dapat memfasilitasi langsung masyarakat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, perekaman e-KTP, Dinas Dukcapil



ABSTRACT

RAMDAN B. AMADU. S2120015. ANALYSIS OF PUBLIC PARTICIPATION IN RECORDING ELECTRONIC ID CARD AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF GORONTALO CITY

This study analyzes public participation in recording e-ID Cards at the Population and Civil Registration Office of Gorontalo City. It is conducted using a qualitative method. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique covers data integration analysis. This study shows that public participation in recording e-KTP at the Population and Civil Registration Office of Gorontalo City can be observed when the community provides ideas actualized in suggestions and opinions given to the Population and Civil Registration Office of Gorontalo City. The suggestions and opinions are in the form of hopes conveyed to the Population and Civil Registration Office of Gorontalo City to continue to carry out massive educational efforts that can provide awareness and willingness from the community to record e-ID Card as a form of concern for their population identity that can be utilized for their interests. In addition, participation is also seen during the direct administration of e-ID Cards at the Population and Civil Registration Office of Gorontalo City. The study recommends the importance of policies that can change people's thinking about the significance of e-ID Card population identity carried out by the government, especially the Population and Civil Registration Office of Gorontalo City through intensive activities directly to the community, both in socialization or direct assistance for e-ID Card administration services in the sense of carrying out a ball-picking pattern by visiting people who have not yet recorded their e-ID Card and trying to open e-ID Card recording services directly in the community with a running service system that can directly facilitate the community.



Keywords: community participation, e-ID Card recording, Population and Civil Registration Office

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.

"(Q.S An-Nahl: 78)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

"(Q.S Ar-Ra'd: 11)

Gagal jangan menangis berhasil jangan sombang hidup laki – laki tidak dirayakan kecuali kematian, tetaplah dijalur takdir, laki – laki ditakdirkan hidup untuk menghidupi.

Skripsi ini ku persesembahkan sebagai wujud darma baktiku dan tanggung jawabku kepada kedua orang tuaku dan adikku tercinta (alm. Burdin M. Amadu & Ningsih Djibu & Fitriyanti B. Amadu). Terima kasih semoga ALLAH S.W.T. selalu mencerahkan kesehatan, umur yang panjang kepada ibu dan adikku agar kalian bisa menikmati buah dari perjuangan kalian. Tetaplah tersenyum dan menjadi kuat untukku karena tinggal kalian berdualah yang menguatkan sampai di tahap ini.

ALMAMATERKU TERCINTA

**TEMPATKU MENIMBAH ILMU DAN MENEMUKAN KEDEWASAAN
DIRI**

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN.....ii
PERNYATAAN.....iii
ABSTRACTiv
ABSTRAKv
MOTTO ERSEMBAHAN.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....ix
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian..... 5
1.4 Manfaat Penelitian..... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 7
2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat..... 7
2.2 Definisi dan Pentingnya Partisipasi 13
2.3 Jenis Partisipasi 16
2.4 Tahapan dan Bentuk Partisipasi 18
2.5 Hambatan dalam Partisipasi 23
2.6 Peran Pemerintah..... 26
2.7 Kerangka Pikir..... 31
BAB III METODE PENELITIAN SOSIAL..... 34
3.1 Obyek Penelitian 34

3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Informan Penelitian	35
3.5 Sumber Data	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
3.8 Keabsahan Data.....	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Partisipasi Dalam Bentuk Ide Atau Gagasan	45
4.2.2 Partisipasi Dalam Bentuk Fisik Atau Tenaga	50
4.3 Pembahasan	55
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA 61	
LAMPIRAN	63

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subbahanahuwata'ala, karena dengan kuasa-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Dalam proposal ini banyak hal yang menjadi kendala dalam penyusunan, baik dari sisi penentuan materi proposal, referensi, maupun lainnya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan beragam masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan dari Skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih kepada : Bapak Ichsan Gaffar, SE, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Moch. Sakir, S.Sos, S.Ipem, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo,Bapak Purwanto, S.IP, M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan, Bapak Dr. Arman, M.Si, pembimbing I dan bapak Marten Nusi, S.IP, M.AP Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis, Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan tentu harapannya adalah mendapatkan masukan dari pihak lain tentang skripsi ini.

Gorontalo, Desember 2024

Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang berkelanjutan dalam prespektif *Good Governance* salah satunya dapat dilihat melalui instrumen adanya partisipasi masyarakat dalam semua proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan pembangunan adalah bagian dari konsekuensi lahirnya otonomi daerah yang mengedepankan dimensi keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan kontroling dan evaluasi.

Hadirnya masyarakat pada setiap tahapan pembangunan sebagai wujud konkret dari amanah undang-undang untuk memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab akan pembangunan yang dilakukan dan memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah obyek utama dari pembangunan. Kehadiran masyarakat pada wilayah secara kuantitas akan membawa pada konsekuensi pembangunan. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk pada satu daerah, maka tantang pembangunan dalam rangka menuju pada kesejahteraannya akan semakin terlihat.

Secara umum partisipasi masyarakat pada semua jenis pembangunan perlu untuk dilakukan secara konsisten dengan kontrol langsung dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Partisipasi masyarakat pada ruang-ruang kebijakan publik perlu untuk dijaga dan ditumbuh kembangkan dalam rangka

memaksimalkan pembangunan baik secara nasional, maupun pada tataran kedaerahan.

Salah satu bentuk partisipasi publik yang bisa dilakukan adalah ikut serta melakukan pendataan identitas diri dalam wujud identitas kependudukan yang selama ini terus digalakan oleh pemerintah, guna dapat mewujudkan satu data kependudukan yang komprehensif dan terpadu. Dapat disadari bahwa pertumbungan penduduk secara nasional di Indonesia terus mengalami lonjakan pada setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat juga pada banyaknya penduduk yang belum masuk pada pendataan sebagai warga negara dalam satu daerah melalui sistem data base kependudukan. Selain itu juga tingkat pertumbuhan pendudukan juga dapat dilihat pada realisasi penerapan kebijakan *electronik governance* yang telah direncanangkan oleh pemerintah. Melalui sistem data base kependudukan yang berbasis pada keakuratan data penduduk melalui suatu sistem yang dapat menjangkau secara nasional setiap warga negara.

Pendekatan sistem kependudukan berbasis electonik adalah salah satu instrumen dari penjabaran prinsip *Good Governance* lebih khusus tentang pemberian pelayanan publik dengan mengedepankan kepuasan dan ketepatan yang dapat dijadikan sebagai alat ukur pembangunan dalam suatu daerah. Elektronik kartu Tanda Penduduk (E-KTP) merupakan inovasi dokumen kependudukan yang secara akurat dapat memuat sistem keamanan administratif kependudukan yang didalamnya tidak hanya memuat nama atau jenis lainnya, namun juga memuat sidik jari dari setiap warga negara yang dapat mendeteksi setiap orang dalam kapasitasnya sebagai warga yang beraktifitas dalam kebutuhan

hidupnya. Dilain sisi Indonesia juga dinilai memiliki sistem administrasi kependudukan yang lemah, olehnya adanya sistem administrasi dengan basis E-KTP tersebut diharapkan akan membantu keterpaduan data kependudukan.

Beberapa permasalahan universal tentang administrasi kependudukan yaitu: adanya orang yang sudah meninggal masih terdata pada pemilihan umum, dikarenakan memiliki suara ganda atau identitasnya belum dikeluarkan dalam data kependudukan, penerimaan bantuan sosial yang kurang tepat sasaran, disebabkan oleh adanya data yang tidak tersingkronisasi dengan baik, serta beberapa permasalahan lainnya.

Dilain sisi sistem keterpaduan informasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini dianggap kurang mampu memberikan dampak kesadaran menyeluruh bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pendataan indentitas diri mereka. Hal ini tentu menjadikan bagian penting dari tugas pemerintah untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam proses identifikasi data diri melalui wajid E-KTP.

Kota Gorontalo adalah satu daerah yang merupakan ibu Kota Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2022 sebagai mana data badan pusat statistik menyebutkan adalah sebanyak 201.350 jiwa. Disatu sisi berdasarkan data yang dihimpun sebagaimana tercantum dalam salah satu media *gorontalo.antaranews.com*, di Kota Gorontalo bahwa sampai dengan bulan juni tahun 2023 terdapat sebanyak 16.007 jiwa masyarakat Kota Gorontalo belum melakukan rekam KTP-E. Itu artinya bahwa terdapat tingkat partisipasi

masyarakat yang kurang dalam melakukan perekaman identitas diri. Dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah sangatlah penting, karena obyek utama pembangunan adalah masyarakat itu sendiri dan tujuan pembangunan dilakukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, namun menjadi permasalahan jika partisipasi masyarakat kurang maksimal atau bahkan tidak ada dalam proses pelaksanaan e-KTP tersebut.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam partisipasi masyarakat dalam perekaman e-ktp di Kota Gorontalo, diantaranya, yaitu : kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung pada perekaman e-ktp, hal ini nampak dalam pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, yaitu keika penulis melakukan wawancara awal dengan salah satu pegawai tentang adanya warga yang belum melakukan perekaman e-KTP, permasalahan lainnya adalah adanya masyarakat sebagai pendatang baru yang masih menggunakan e-ktp dari tempat asalnya atau kategori KTP lama, rentan usia 55 tahun hingga 75 tahun jumlah penduduk yang enggan melakukan perekaman, pemula yang berusia 17 tahun yang belum menyadari akan pentinya perekaman e-KTP, serta beberapa permasalahan lainnya yang menjadi kendala kurannya partisipasi masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan, serta menghimpun data kependudukan masyarakat kota gorontalo, memeliki tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan sistem data kependudukan yang terpadu dan komprehensif untuk dapat memudahkan tujuan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana dijelaskan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah Partisipasi masyarakat dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi masyarakat dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Dasar penelitian adalah memberikan dampak pada lingkungan akademis, maupun praktik pemerintahan, khususnya berkaitan dengan lokus penelitian. Olehnya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada Pemerintahan Kota Gorontalo, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dalam mencari model terbaik guna mewujudkan partisipasi masyarakat pada perekaman e-ktp.
 - 1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ukuran bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian serupa dengan judul ini atau sejenisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

LutfiyanaKhusna (2017) mendefinisikan bahwa memiliki kedudukan yang urgensi dalam rangka upaya untuk meuwujudkan pembangunan dan memberikan indikator akan tahapan dari partisipasi, diantaranya :

- a. Tahap perumusan kebijakan, yang diaktualisasikan dengan keterlibatan masyarakat pada pertemuan-pertamuan.
- b. Tahap realisasi, adalah tahap yang penting dalam pembangunan, karena ujung dari sebuah pencapaian tujuan pembangunan adalah adanya realisasi atau pelaksanaan yang jelas akan apa yang direncanakan
- c. Tahap hasil, tahapan ini adalah bagian lain dari penilaian akan pencapaian tujuan dari partisipasi.
- d. Tahapan Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan programselanjutnya.

Kegiatan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan meliputi pengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, penyusunan program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang diarahkan dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat pedesaan setempat berarti pembangunan yang

bersifat batiniah karena anggota masyarakat dianggap paling mengenal potensi dan kondisi masyarakat. Menurut kutipan dari (Rahardjo adisasmita; 2016: 2), partisipasi adalah prakarsa semua pelaku pembangunan, termasuk penyedia dan penerima layanan, peran dan keterlibatan aktif, dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, artinya lingkungan sosial dalam pemantauan Implementasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inisiatif anggota masyarakat dan partisipasi aktif berarti keterlibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pengembangan masyarakat.

Konsepsi partisipasi masyarakat terkait secara langsung dengan demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, akan: “memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang.

Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam pelbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Sesungguhnya, sudah saatnya bagi kita untuk lebih memperhatikan kehendak rakyat yang sebenarnya sekaligus mendidik mereka terlibat dalam gerak pembangunan dengan sepenuh hati. (Wahyudi, 2007:135).

Partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang untuk berkontribusi secara sukarela dalam kegiatan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Newstron (2007:182) yang mengatakan partisipasi atau “*participation*“ adalah keikutsertaan individu secara fisik dan emosional dalam kelompok serta melakukan kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok.

Menurut Mikkelsen (1999: 64) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan partisipasi adalah keikutsertaan individu secara fisik dan emosi yang aktif dalam kelompok serta melakukan kontribusi sesuai dengan inisiatif dan kemampuan individu tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan cara yang efektif dalam membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. Selanjutnya partisipasi masyarakat juga dianggap dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan sampai pada tingkat paling bawah. Walaupun peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan menentukan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, oleh karena untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah merupakan pekerjaan yang gampang. Berbagai macam kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat saja berasal dari masyarakat itu sendiri, dari lembaga atau organisasi, atau bahkan dari pemerintah desa itu sendiri.

Kerja sama ini menuntut interaksi yg setara antara pemerintah & warga, karenanya warga diupayakan mempunyai kapasitas baik secara individu juga kelembagaan. Kapasitas individu & kelembagaan inilah yg sebagai faktor kunci pada keberhasilan acara pemberdayaan. Kemudian Huraerah dikutip oleh Alfitri (2018:38) mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri, menyeleksi alternatif tindakan atau program dan mengimplementasikan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi program.

Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan (dikutip dari Wibowo arif, 2016: 149150). Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal.Pembangunan hanya menghasilkan produk baru yang kurang masuk akal bagi masyarakat dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dikutip dari Taliziduhu ndraha (2017;45) dapat didorong melalui, yakni:(1) Sederhana, desain muda, proyek pengembangan masyarakat lokal yang dikelola masyarakat. (2) Organisasi dan lembaga masyarakat yang dapat menggerakkan dan mengarahkan keinginan masyarakat. (3) Memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Karena itu, kami masih membutuhkan tempat yang bagus di level grup. Melalui forum partisipasi tingkat kelompok, anggota kelompok saling belajar melalui pendekatan “pembelajaran praktis” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, yang mengarah pada perubahan dan pengembangan potensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang mendiami suatu tempat, saling berhubungan, dan berorganisasi. Menurut Slamet (2004) masyarakat sama dengan “*community*” yang artinya sekelompok individu berjumlah besar maupun kecil yang hidup bersama sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut memenuhi kepentingan hidup yang utama.”

Menurut Suharto (2010: 47) masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan- kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah dengan waktu tertentu sehingga terjadi perasaan dan kepentingan yang sama.

Menurut Adisasmita (2006) mengemukakan partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang di kerjakan di dalam masyarakat lokal.

Sedangkan menurut Soetomo (2008:439-440) mengatakan partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembagunan yang mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta dalam evaluasi.

Zamroni (2011:51) mengatakan bahwa Partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum.

Partisipasi masayarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni,2013).

Selain pendapat di atas, Mulyadi (2009:13) mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu proogram, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, merupakan salah satu aspek dari proses demokratisasi yang juga dituntut oleh pemerintahan yang baik. Dalam aspek ini, demokrasi dapat dipahami sebagai persamaan kesempatan berpartisipasi oleh setiap anggota masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.Kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dalam

kaitannya dengan partisipasi masyarakat, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam pengertian pembangunan itu sendiri terkandung pengertian seluruh rakyat atau bangsa sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Dikutip dari Alfitri (2018:233) mengatakan ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam suatu program.(1) Partisipasi masyarakat adalah alat untuk memperoleh informasi tentang situasi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpanya pembangunan dan proyek akan gagal. (2) Artinya, masyarakat dapat mempercayai proyek atau pembangunan tersebut. Karena mereka mengetahui detail proyek dan memiliki kepemilikan proyek, mereka merasa bahwa saya terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan. (3) Mendorong partisipasi masyarakat umum di banyak negara karena dianggap sebagai hak demokrasi jika mereka terlibat dalam pengembangan komunitas mereka sendiri.

Berdasarkan apa yang disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

2.2 Definisi dan Pentingnya Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan adalah elemen penting yang mengubah masyarakat dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Dalam pengertian ini, partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan,

pelaksanaan, hingga evaluasi program. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, mengungkapkan kebutuhan mereka, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tanpa partisipasi yang aktif, pembangunan cenderung berjalan sepihak dan bisa kehilangan relevansi dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat yang sesungguhnya (Khusna 2017).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka memiliki kesempatan untuk mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Hal ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, karena setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya partisipasi, masyarakat dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menanggulangi potensi masalah, sehingga pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien (Novitasari & Iswara., 2024).

Partisipasi masyarakat juga membantu menciptakan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mereka dapat mengemukakan aspirasi, kebutuhan, serta tantangan yang mereka hadapi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang program-program pembangunan yang tidak hanya berbasis pada data statistik atau teori, tetapi juga berakar pada pengalaman dan kebutuhan langsung masyarakat. Dengan demikian, program yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi

kesejahteraan masyarakat (Latifah dkk., 2024

Partisipasi masyarakat juga dapat mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa terasing dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang sering kali dianggap tidak mencerminkan kepentingan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, rasa keterasingan ini dapat diminimalisir. Masyarakat merasa dihargai dan memiliki kontrol atas keputusan-keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan suaranya didengar, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan yang ada, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga berperan dalam menciptakan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut. Hal ini dapat meningkatkan komitmen mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengelola hasil pembangunan. Sebagai contoh, dalam program perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada proses administratif, tetapi juga pada kesadaran akan pentingnya identitas kependudukan. Ketika masyarakat memahami manfaat langsung dari memiliki identitas yang jelas dan valid, mereka akan lebih bersemangat untuk mendukung proses perekaman, sehingga tujuan program tercapai dengan lebih efektif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan

yang berkelanjutan dan inklusif.

2.3 Jenis Partisipasi

Dikutip dari Ndraha (2017:57) bahwa upaya untuk membangkitkan keinginan atau kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu dengan jalan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan harus:

- a. Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
- b. Ini berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong masyarakat untuk datang dengan jawaban yang diinginkan.
- c. Hal ini digunakan sebagai motivasi bagi masyarakat untuk bekerja menghasilkan perilaku yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka partisipasi masyarakat akan timbul apabila ada stimulasi yang diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya (dikutip dari Ndraha (2017:57). Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang sangat diharapkan dari masyarakat, adalah:

- a. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pikiran atau ide-ide, maupun gagasan-gagasan yang disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan, seperti Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan untuk pembuatan peraturan desa dan kebijakan pemerintahan desa. Melalui BPD ini, masyarakat ikut serta dalam menyumbangkan masukan berupa sumbangan pemikiran, ide atau gagasan dalam rangka perumusan berbagai kebijakan pemerintahan desa dan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Selanjutnya

hasil-hasil dari perumusan itulah yang kemudian diajukan kembali pada musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan.

b. Partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga, dapat dilihat dalam berbagai program pembangunan yang bersifat fisik, di mana pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja banyak, seperti pembuatan atau perbaikan jalan desa/kelurahan, pembuatan jembatan darurat dan sebagainya. Pada program-program seperti ini memang memerlukan lebih banyak tenaga (fisik) daripada sumbangan berupa dana atau harta benda.

c. Partisipasi dalam bentuk harta benda atau dana

Partisipasi dalam bentuk harta benda atau dana juga dapat dilihat dari proyek-proyek pembangunan prasarana dan sarana desa, yang bersifat fisik. Dalam hal ini masyarakat secara langsung ikut serta menanggung biaya dan bahan yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

Setelah masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka hal-hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kadar partisipasi tersebut, sehingga dapat memberikan sumbangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. Sehubungan dengan itu, maka cara-cara yang ditempuh untuk meningkatkan partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
2. Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari keputusan dan rencana yang dibuat.

3. Mencari umpan balik dan saran tentang pengambilan keputusan dan perencanaan.
4. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka untuk membuat keputusan dan rencana.

2.4 Tahapan dan Bentuk Partisipasi

Mulyadi (2009:26-49) menjelaskan bahwa dalam konsep partisipasi public adanya beberapa proses atau tahapan partisipasi yang secara konkret terjadi di masyarakat, diantaranya:

- a. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan.

Yaitu bentuk keikutsertaan masyarakat pada proses pengambilan keputusan, baik dalam bentuk forum musyawarah pembangunan, keterlibatan secara langsung dalam bentuk fisik, maupun ide tau gagasan. Adapun bentuk-bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan:

1. Partisipasi Langsung: Anggota kelompok atau masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat berupa pemungutan suara, forum diskusi, atau rapat terbuka.
2. Partisipasi Konsultatif: Dalam bentuk ini, pengambil keputusan meminta pendapat atau masukan dari individu atau kelompok, namun keputusan akhir tetap di tangan pengambil keputusan.
3. Partisipasi Informasional: Pihak-pihak yang terlibat hanya diberikan informasi terkait keputusan yang akan diambil, dan keputusan diambil oleh pihak yang lebih tinggi tanpa ada keterlibatan langsung dari mereka.

4. Partisipasi Delegatif: Pengambil keputusan memberikan sebagian kewenangannya kepada pihak lain untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu.
- b. Partisipasi di dalam pelaksanaan.

Adalah bagian keterlibatan langsung masyarakat pada kegiatan realisasi pembangunan di Desa. Hal ini menunjukkan adanya sikap konrit masyarakat dalam pembangunan.pada tahap perencanaan.
- c. Partisipasi di dalam kemanfaatan.

Bentuk lain dalam partisipasi masyarakat yang berimplikasi langsung pada kehidupan bersama masyarakat. Seperti gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan, pada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan.

Dari penjelasan akan bentuk partisipasi pada bagaiian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indicator akan partisipasi masyarakat, baik pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kemanfaatan dan pelaksanaan adalah ukuran dari keberhasilan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Menurut Teraik Kogoya, (2015: 13) dalam penelitiannya yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua" mengemukakan bentuk partisipasi diantaranya(1) Partisipasi dalam perencanaam bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat memberikan saran/usulan, (2) Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terdiri atas sumbangan tenaga, dana, dan material (3)Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan adalah bentuk sumbangan tenaga dan uang.

Robert (2001: 103-104) mengatakan beberapa bentuk-bentuk partisipasi

masyarakat diantaranya : (1) *Public hearing* adalah pertemuan dengan publik secara formal dan biasanya diperlukan berdasarkan hukum atau peraturan, (2)*Public meeting* adalah pertemuan dengan publik secara informal untuk membahas isu yang timbul, (3) Presentasi didepan publik adalah ceramah (*lecture*) dan diskusi tentang topik yang khusus untuk menginformasikan sesuatu pada publik dan bertukar informasi, (4) Kunjungan lapangan (*site visit*) adalah ceramah (*lecture*) dan diskusi tentang topik yang khusus untuk meningkatkan sensitive perencana dan penduduk pada dampak pekerjaan, (5) Badan pertimbangan atau penasehat penduduk adalah beberapa masyarakat yang secara resmi di tunjuk untuk mewakili untuk membuka kesempatan terjadinya komunikasi dua arah dengan suatu badan perwakilan dan untuk membantu memperoleh dukungan masyarakat.

Suwandi (2015) dalam penelitiannya mengatakan beberapa bentuk–bentuk partisipasi yang dilakukan dalam suatu pembangunan daerah yaitu (1) Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan, keikutsertaan masyarakat desa secara umum melalui forum musyawarah, yaitu melalui Musrembangdes. (2) Partisipasi masyarakat pada proses pelaksanaan, keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sebelumnya. (3) Partisipasi masyarakat pada proses pengawasan, masyarakat berpartisipsi untuk menjaga jalannya kegiatan pembangunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan dan menjaga hasil pembangunan tersebut.

Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015: 58-59) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua

bagian,yaitu:

- a. Partisipasi secara fisik. Dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yanglain.
- b. Partisipasi secara non fisik. Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.

Mubyanto dalamndraha (2004) bahwa dalam suatu partisipasi masyarakat tentunya ada berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalamnya. Diantaranya yaitu.

- a. Partisipasi dilakukan dengan cara berkontak langsung antar individu sebagai bentuk awal dari kegiatan sosial dimasyarakat.
- b. Partisipasi mampu untuk menyerap maupun menerima informasi baik menerima maupun menolak informasi yang diterima.
- c. Partisipasi bertujuan dalam ikut serta andil dalam sebuah pengambilan keputusan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
- d. Partisipasi bergerak dengan menggunakan konsep pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Davis dalam jurnal yang ditulis oleh AnthoniusIbori (2013) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan.
- b. Partisipasi dalam bentuk tenaga
- c. Partisipasi dalam bentuk pikiran dan juga tenaga.
- d. Partisipasi dalam bentuk keahlian.
- e. Partisipasi dalam bentuk barang.
- f. Partisipasi dalam bentuk uang.”

Menurut Huraerah (2011:116) menyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi massyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, dalam bentuk sosial.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah : partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, partisipasi dalam bentuk keahlian, partisipasi dalam bentuk barang dan partisipasi dalam bentuk uang.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jenis-jenis dalam partisipasi masyarakat secara umum ada 3 (tiga) macam yaitu (1) partisipasi masyarakat pada perencanaan program, adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan program. Contoh kegiatan pada pertemuan masyarakat, musawarah desa. (2) Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan

program adalah keikutsertaan masyarakat pada penerapan atau pelaksanaan program. Contoh kegiatan yaitu partisipasi uang, tenaga, maupun pikiran. (3) Partisipasi masyarakat pada evaluasi, adalah keikutsertaan masyarakat dalam menilai dan mengawasi kegiatan.

2.5 Hambatan dalam Partisipasi

Meskipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki banyak manfaat, dalam praktiknya, ada berbagai hambatan yang sering kali menghalangi proses tersebut. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam setiap tahapan pembangunan. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami betapa besar dampak partisipasi mereka terhadap perubahan yang diinginkan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpedulian dan apatisme terhadap program-program pemerintah. Misalnya, dalam konteks perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), banyak masyarakat yang mungkin tidak menyadari pentingnya memiliki identitas kependudukan yang sah dan terintegrasi dengan sistem nasional. Mereka belum tentu paham bahwa E-KTP bukan hanya sebagai bukti identitas, tetapi juga sebagai syarat utama dalam mengakses layanan publik, memilih dalam pemilu, serta mendapatkan perlindungan hak-hak sipil mereka. Tanpa pemahaman ini, masyarakat cenderung kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses perekaman, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan dari program tersebut (Simarmata & Yusuf., 2024).

Selain kurangnya kesadaran, faktor pendidikan juga menjadi penghalang besar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat dengan

tingkat pendidikan yang rendah sering kali merasa tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik atau program pemerintah. Mereka mungkin merasa bahwa pendapat mereka tidak akan dihargai atau diterima oleh pihak berwenang, sehingga lebih memilih untuk tidak menyuarakan pendapat. Selain itu, ketidaktahuan tentang prosedur atau mekanisme partisipasi seringkali membuat mereka merasa bingung atau tidak berdaya. Sebagai contoh, dalam program perekaman E-KTP, seseorang yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi informasi bisa merasa kesulitan untuk memahami proses pendaftaran secara online atau menggunakan perangkat elektronik untuk mendaftar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakaktifan dan keterlambatan dalam pelaksanaan program yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Soselisa., 2021).

Hambatan lainnya yang cukup signifikan adalah adanya stigma sosial atau budaya yang melekat dalam beberapa komunitas. Dalam beberapa kasus, norma sosial atau tradisi tertentu mungkin membatasi individu untuk bersuara atau terlibat dalam kegiatan publik. Di beberapa masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan atau komunitas yang sangat terpencil, ada pandangan bahwa keputusan-keputusan penting sebaiknya diserahkan kepada pemimpin atau pihak berwenang tanpa keterlibatan masyarakat biasa. Hal ini bisa disebabkan oleh budaya patriarki, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, atau pengalaman negatif di masa lalu yang membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi. Misalnya, generasi yang lebih tua, yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi modern,

seringkali enggan untuk mengikuti perkembangan seperti perekaman E-KTP yang berbasis teknologi. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau takut gagal dalam menggunakan perangkat yang tidak familiar, sehingga lebih memilih untuk menghindari proses tersebut. Stigma semacam ini menghambat partisipasi yang lebih luas dan merugikan tercapainya inklusivitas dalam pembangunan.

Faktor lainnya yang turut menghambat partisipasi adalah terbatasnya akses informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak program pembangunan, termasuk perekaman E-KTP, yang tidak disertai dengan upaya sosialisasi yang memadai. Tanpa pemahaman yang tepat tentang tujuan, manfaat, serta prosedur yang terlibat, masyarakat akan merasa kesulitan dan kurang tertarik untuk berpartisipasi. Hal ini semakin diperburuk jika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat, atau jika ada ketidakjelasan dalam instruksi yang diberikan. Penyuluhan atau edukasi yang tidak efektif hanya akan memperburuk kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, dan meningkatkan rasa ketidakpercayaan terhadap tujuan program tersebut.

Masalah infrastruktur dan jarak geografis juga menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Di daerah-daerah terpencil atau perdesaan, akses ke fasilitas umum atau tempat-tempat pelayanan publik bisa sangat terbatas. Proses perekaman E-KTP, misalnya, sering kali membutuhkan perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau tempat pelayanan administrasi lainnya. Hal ini menjadi kendala bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat layanan, terutama bagi masyarakat yang lebih tua atau yang memiliki keterbatasan fisik.

Jarak yang jauh, biaya transportasi yang tinggi, dan ketidakmampuan untuk meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab rumah tangga membuat sebagian masyarakat merasa tidak mungkin untuk mengikuti prosedur yang ada. Dalam hal ini, pemerintah perlu mencari solusi yang lebih inklusif, seperti mendirikan pos pelayanan keliling atau menggunakan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan secara lebih praktis (Aromatica dkk., 2024).

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan partisipasi yang maksimal dalam pembangunan, diperlukan usaha lebih dalam mengatasi kesenjangan kesadaran, pendidikan, budaya, akses informasi, dan infrastruktur. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi, menyediakan pelatihan, serta membangun sistem yang lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

2.6 Peran Pemerintah

Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, termasuk perekaman E-KTP. Salah satu langkah awal yang krusial adalah melakukan sosialisasi secara masif dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya E-KTP dan manfaat yang dapat diperoleh dari identitas kependudukan yang sah. Melalui kampanye informasi yang komprehensif, pemerintah dapat menjelaskan bagaimana E-KTP bukan hanya sekadar kartu

identitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Dengan memberi pemahaman tentang perlindungan hak-hak sipil yang dapat diperoleh melalui E-KTP, masyarakat akan lebih ter dorong untuk berpartisipasi dalam perekaman (Saputri.,2024).

Adapun proses tahapan peran pemerintah dalam perekaman e-ktp sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengatur proses perekaman e-KTP. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk memiliki KTP, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk e-KTP.

2. Infrastruktur dan Sistem Teknologi

Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk perekaman dan penerbitan e-KTP. Ini termasuk:

- Penyediaan perangkat keras (misalnya, alat perekam e-KTP, kamera, pemindai sidik jari, dll.).
- Pengembangan sistem elektronik yang terintegrasi untuk perekaman data kependudukan secara nasional.

- Pengelolaan database kependudukan nasional yang berisi data seluruh warga negara Indonesia.

3. Perekaman Data Kependudukan

Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di setiap daerah bertugas untuk melakukan perekaman data e-KTP kepada seluruh penduduk yang sudah memenuhi syarat. Proses perekaman meliputi pengumpulan data pribadi seperti nama, alamat, foto, tanda tangan, sidik jari, dan data biometrik lainnya.

4. Penerbitan e-KTP

Setelah proses perekaman selesai, pemerintah melalui Disdukcapil bertanggung jawab untuk mencetak dan menerbitkan e-KTP kepada masyarakat. Kartu tersebut memuat chip elektronik yang berisi data kependudukan yang tersimpan dalam database nasional.

5. pemeliharaan dan Pembaruan Data

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan memperbarui data kependudukan. Hal ini termasuk memperbarui data warga yang sudah menikah, pindah alamat, atau terjadi perubahan status kependudukan lainnya. Pembaruan data e-KTP juga dapat dilakukan untuk mengganti e-KTP yang hilang atau rusak.

6. Pelayanan Publik dan Keterpaduan Sistem

Pemerintah berperan dalam memastikan bahwa e-KTP digunakan untuk berbagai layanan publik, seperti perbankan, kesehatan, pemilu, dan layanan administrasi lainnya. e-KTP ini juga menjadi kunci dalam mempercepat sistem pelayanan publik dengan menyediakan data yang terintegrasi dan mudah diakses oleh berbagai lembaga.

7. Pendidikan dan Sosialisasi

Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya e-KTP, cara melakukan perekaman, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat lebih sadar dan terinformasi tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses ini.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan proses perekaman e-KTP berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Pemerintah juga berfungsi untuk menjaga integritas data, serta memanfaatkan e-KTP untuk mendukung program-program pembangunan nasional.

Selain sosialisasi, pemerintah harus memastikan bahwa proses perekaman E-KTP dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa hambatan. Salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah dengan membuka layanan perekaman di berbagai lokasi strategis yang dekat dengan komunitas, seperti sekolah, pusat kesehatan, pasar, atau tempat-tempat umum lainnya. Pendekatan "jemput bola" ini

penting untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang mungkin menghadapi kendala jarak atau keterbatasan mobilitas, seperti lansia, ibu rumah tangga, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan mendekatkan layanan ini ke masyarakat, pemerintah memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mendaftarkan diri tanpa merasa terbebani oleh jarak atau waktu.

Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program yang ada, termasuk perekaman E-KTP, guna memastikan efektivitas dan efisiensinya. Evaluasi ini tidak hanya berbentuk pengukuran kuantitatif, tetapi juga mencakup pengumpulan umpan balik dari masyarakat terkait pengalaman mereka selama proses perekaman. Misalnya, apakah prosedur perekaman sudah cukup mudah dipahami, apakah fasilitas yang tersedia cukup memadai, atau apakah ada masalah teknis yang menghambat proses. Dengan mendengarkan dan merespons umpan balik tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, baik dari sisi prosedur, infrastruktur, maupun layanan yang diberikan. Proses evaluasi yang inklusif ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas, pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi dalam memfasilitasi perekaman E-KTP. Penggunaan aplikasi mobile atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran atau memperbarui data mereka secara online dapat menjadi alternatif yang sangat membantu, terutama bagi mereka yang sulit mengakses kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) secara

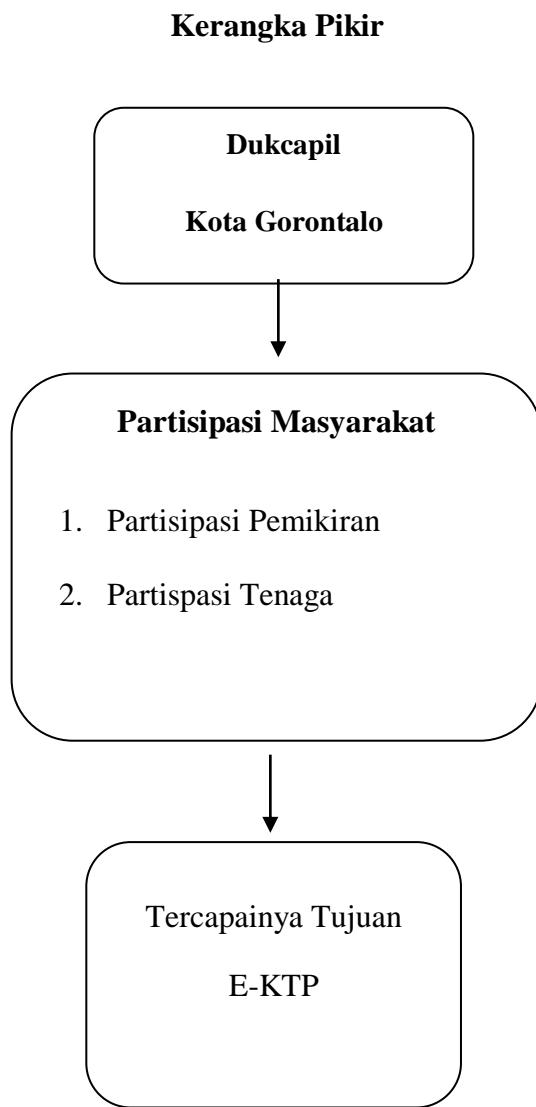
langsung. Namun, penggunaan teknologi ini harus disertai dengan upaya untuk mengatasi kesenjangan digital, seperti menyediakan pelatihan bagi masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, agar tidak ada kelompok yang terabaikan.

Untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan, dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan perekaman E-KTP. Kerja sama ini penting untuk memperluas jangkauan informasi dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kolaborasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi aktif masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan program pembangunan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan (Fauziyah., 2023).

2.7 Kerangka Pikir

Prinsip penyelenggaraan layanan publik yang cepat dan tepat diharapkan akan menjadi solusi pada kepuasan masyarakat, lebih khusus berkaitan dengan pemanfaatan seluruh layanan publik dengan menggunakan identitas diri berupa e-ktp. Problematika umum terkait layanan pembuatan rekaman identitas diri masyarakat berupa e-ktp pada ujung sangat tergantung pada partisipasi masyarakat untuk secara sadar datang melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang dalam pengakumulasi dan melakukan pendaftaran diri setiap warga negara. Dinas kependudukan dan catatatan sipil Kota Gorontalo memiliki kebijakan yang sama dengan Dinas di Daerah lain dalam mensukseskan program rekam wajib identitas

diri masyarakat untuk mempermudah kolektif pendataan warga yang ada di Kota Gorontalo. Fakta empirik menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman e-ktp masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kesadaran yang kurang akan pentingnya e-ktp, proses pendataan bagi warga yang baru berusia 17 tahun yang kurang dilakukan, serta permasalahan lainnya.



Tabel 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN SOSIAL

3.1 Obyek Penelitian

Penulis telah menguraikan fenomena dan lokus penelitian sebagaimana tertuang dilatar belakang penelitian ini. Olehnya berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, serta faktor penghambatnya.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah berupaya untuk menggambarkan atau mendiskripsikan temuan penelitian secara objektif sesuai dengan focus kajian penelitian. Olehnya penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Kualitaif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008) bahwa penelitian Kualitatif adalah merupakan penelitian dengan variable mandiri yang tidak memasukan variable lain sebagai pembanding yang hasilnya akan memberikan gambaran secara utuh kepada penulis.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam hal memberikan batasan atau focus bagi penulis untuk menentukan arah dari penelitian yang dilakukan, maka penulis memahami bahwa diperlukan

focus kajian atau sering disebut dengan focus penelitian. Adapun fokus penelitian penulis adalah :

Partisipasi masyarakat dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo yang dilihat pada kebeberpa bentuk, yaitu :

- a) Partisipasi dalam pemikiran, ide atau gagasan
- b) Partisipasi dalam bentuk fisik atau tenaga

3.4 Informan Penelitian

Informan yang diambil atau ditentukan oleh penulis dalam usulan penelitian ini adalah mereka yang dianggap mengetahui tentang focus kajian atau apa yang ingin dikaji oleh penulis. Melalui teknik teknik purposive sampling dimana Riduan (2008, hal) menjelaskan bahwa penggunaan teknik purposive digunakan untuk mendapatkan informasi melalui informan, karena dianggap mengetahui focus kajian penelitian. Beberapa informan tersebut adalah :

- | | |
|-------------------------------|---------|
| a) Kepala Dinas Dukcapil | 1 Orang |
| b) Kepala Bidang Layanan Umum | 1 Orang |
| c) Pegawai Operasional | 2 Orang |
| d) Masyarakat | 4 Orang |

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Primer, adalah : data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan.
2. Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting dan relevan dengan apa yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilapangan, maka terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam upaya proses pengumpulan data, yaitu :

- a) Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya, dimana muatan materi wawancara tersebut merupakan hal yang relevan dengan fokus penelitian
- b) Observasi atau pengamatan, yaitu suatu teknik pengumpulan data, dimana penulis melakukan pengamatan langsung tentang aktivitas atau kejadian dilapangan yang sesuai dengan masalah yang diteliti
- c) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data, di mana penulis menjaring informasi melalui data dokumen yang tersedia di lokus penelitian dan yang sesuai dengan fokus kajian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008) analisis data kualitatif digunakan oleh peneliti pada saat melakukan pengumpulan data berlangsung dilapangan, maupun setelah

melakukan penelitian. Upaya untuk menggunakan analisis data dengan melihat beberapa teori tentang metode analisis yang ada, maka penulis menggunakan teknis analisis data sebagaimana yang pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:97) yang membagi empat hal penting dalam analisis data kualitatif, yaitu :

a) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan. Langkah ini sebagai pembuka dari proses penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan seluruh data-data yang dianggap relevan dan bisa dijadikan sebagai bahan kajian pada apa yang sedang diteliti.

b) Reduksi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan data. Pemetaan data atau disebut dengan Reduksi data adalah langkah analisis data hasil pengumpulan yang bertujuan untuk melakukan klasifikasi data-data yang dianggap penting dan relevan dengan apa yang akan dianalisis, mengingat banyaknya data-data yang diperoleh dilapangan. Sehingga memudahkan peneliti saat melakukan penyusunan hasil penelitian.

c) Penyajian Data

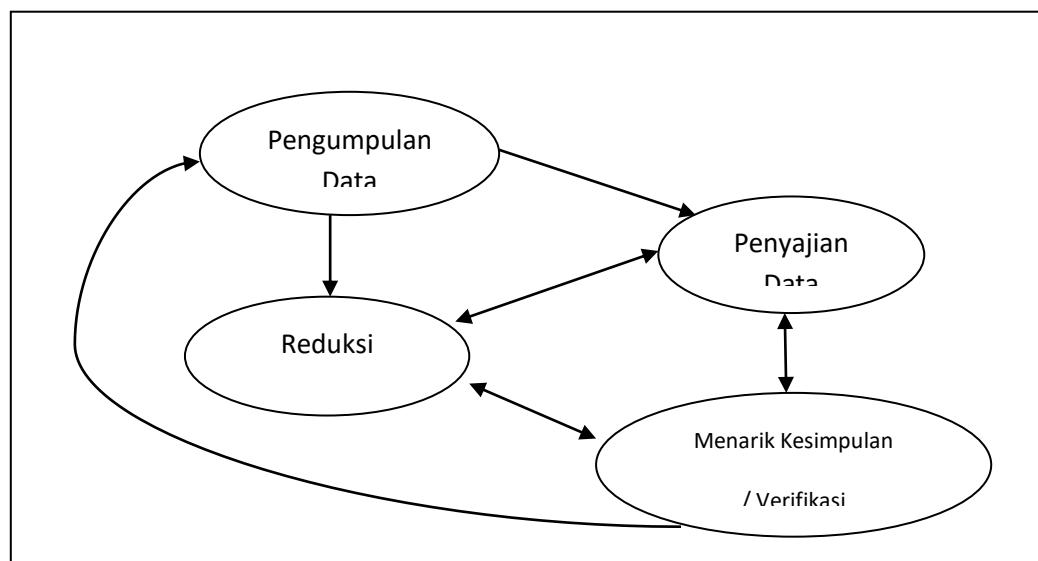
Penyajian data adalah langkah selanjutnya setalah dilakukannya reduksi data oleh peneliti. Hal ini sebagai proses uraian hasil penelitian setelah

peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dan direduksi dengan baik oleh peneliti yang kemudian disajikan kedalam bentuk laporan.

d) Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data kualitatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008), adalah upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi tentang temuan penelitian.

Komponen-komponen analisa data model interaktif tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Sumber: Miles dan A. Michael Huberman diterjemahkan

oleh (Sugiyono 2008).

Gambar 3.1 komponen dalam analisis data: model interaktif

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu :

1) Derajat kepercayaan (*credibility*)

Peneliti melakukan antisipasi melalui langkah-langkah melakukan observasi secara terus menerus, melakukan triagulasi dengan menggunakan sumber perbandingan terhadap apa yang dikatakan oleh informan dengan apa yang menjadi hasil pengamatan.

2) Keteralihan (*transferability*)

Makna keteralihan dalam proses uji keabsahan data ini adalah, dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama.

3) Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan dilakukan untuk mengetahui, mengecek, serta memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau tidak.

4) Kepastian (*confirmability*)

Kepastian yang dimaksud adalah penulis berusaha untuk seobjektif mungkin dalam melakukan telaah dan klasifikasi tentang data temuan. Sehingga ketika terjadi perbedaan, maka penulis melakukan konfirmasi atau kroscek kembali data temuan tersebut dengan fokus kajian yang dilakukan.

(Moleong, 2005)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Gorontalo adalah ibukota Provinsi Gorontalo. Kota ini memiliki motto “ADAT BERSENDIKAN SYARAK, SYARAK BERSENDIKAN KITABULLAH” sebagai pandangan hidup masyarakat yang memadukan adat dan agama. Kota Gorontalo ini mempunyai luas wilayah 79,03 km². terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, 50 (lima puluh) kelurahan. Kesembilan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kota Barat , Kota Selatan, Kota Utara, Dungingi, Kota Timur, Kota Tengah, Sipatana, Dumbo Raya, dan Hulonthalangi. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Tolitoli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

Kota ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 129 mm per bulan dan suhu rata-rata 26,5 °C. Kota Gorontalo menempati satu lembang yang sangat luas yang

membentang hingga ke wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Wilayah pinggiran pantainya berupa perbukitan yang tersusun dari batuan karst termasuk yang berbatasan dengan pantai yang berada di Teluk Tomini. Secara geografis wilayah Kota Gorontalo terletak antara $00^{\circ} 28' 17''$ - $00^{\circ} 35' 56''$ Lintang Utara (LU) dan $122^{\circ} 59' 44''$ - $123^{\circ} 05' 59''$ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah $79,03 \text{ km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

Batas Timur : Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango

Batas Selatan : Teluk Tomini

Batas Barat : Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Sebagian besar wilayah Kota Gorontalo merupakan daerah dataran yang memiliki 9 wilayah Kecamatan yang terbagi 50 Kelurahan yaitu :

- 1) Kecamatan Kota Barat : 7 Kelurahan
- 2) Kecamatan Kota selatan : 5 Kelurahan
- 3) Kecamatan Kota Utara : 6 Kelurahan
- 4) Kecamatan Dungingi : 5 Kelurahan
- 5) Kecamatan Kota Timur : 6 Kelurahan
- 6) Kecamatan Kota Tengah : 6 Kelurahan
- 7) Kecamatan Sipatana : 5 Kelurahan
- 8) Kecamatan Dumbo Raya : 5 Kelurahan
- 9) Kecamatan Hulonthalangi : 5 Kelurahan

Kota Gorontalo dengan luas wilayah 79,03 km² didiami penduduk sebanyak 204.444 jiwa, terdiri dari 101.836 jiwa laki-laki dan 102.608 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Dungingi, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Sipatana, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan Hulonthalangi. Dari tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kota Tengah yaitu 27.461 jiwa (13,43%), sedangkan Kecamatan Hulonthalangi memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 16.936 Jiwa (8,28%).

Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Kota Selatan merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 7.251 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kota Tengah sebesar 5.672 jiwa/km², Kecamatan Dungingi sebesar 5.648 jiwa/km², Kecamatan Kota Timur sebesar 5.023 jiwa/km² dan Kecamatan Sipatana sebesar 3.892 jiwa/km², Kecamatan Kota Utara sebesar 2.625 jiwa/km², Kecamatan Dumbo Raya sebesar 1.370 jiwa/km² dan Kecamatan Kota Barat sebesar 1.231 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah di Kecamatan Hulonthalangi yaitu sebesar 1.182 jiwa/km².

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo berdomisili di Kota Gorontalo beralamat di Jalan Ahmad Nadjamudin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah. Dengan adanya penerapan Undang - Undang nomor 23 tahun 1999 tentang otonomi daerah yakni memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di

Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo telah mencoba mengimplementasikan dalam praktik pelaksanaan tugas baik di Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2014 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gorontalo tahun 2014 - 2019, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2014 - 2019 yaitu "Kota SMART". Rangkaian program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tahun 2014 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gorontalo tahun 2014 - 2019.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Gorontalo dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota Gorontalo, berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo.

Dinas catatan kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : “Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas”

Misi yaitu :

- 1) Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- 2) Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan masyarakat serta pembangunan;
- 3) Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk;
- 4) Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, dan motto “Tiada Hari Tanpa Peningkatan Mutu Pelayanan.

4.2 Hasil Penelitian

Keterlibatan masyarakat dalam semua hal yang berkaitan dengan pembangunan menjadi tuntutan saat ini seiring dengan penerapan konsep

Desentralisasi sebagai bentuk konsekuensi pentingnya partisipasi publik. Ruang partisipasi publik sejatinya menjadi bagian penting dari keberlangsungan pembangunan daerah yang dalam konsep pembangunan saat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi terhadap realisasi pembangunan yang dilaksanakan. Konsep pembangunan yang dimaksud juga sangat ditentukan sejauh mana pemerintah mampu melakukan penetrasi terhadap aspek kependudukan, khususnya berkaitan dengan jumlah kependudukan yang dapat menjadi referensi perumusan kebijakan pembangunan.

Kesadaran akan pentingnya identitas kependudukan menjadi urgen untuk dimaksimalkan keberadaannya yang harus didorong oleh pemerintah melalui keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi melakukan pengurusan e-KTP di Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait partisipasi masyarakat dalam pengurusan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo yang dianalisis pada dua pendekatan, yaitu :

4.2.1 Partisipasi Dalam Bentuk Ide Atau Gagasan

Dalam hal berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada pengurusan identitas kependudukan berupa e-KTP di Kota Gorontalo yang dilihat pada keterlibatan secara langsung melalui penyampaian saran, ide atau gagasan yang dilakukan oleh masyarakat, terdapat keterangan hasil wawancara bersama beberapa informan, diantaranya :

Wawancara bersama kepala Dinas Dukcapil Kota Gorontalo tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan pada e-KTP yang menjelaskan bahwa :

“ Ya untuk e-KTP ini sebetulnya memerlukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk kesadaran yang utuh akan pentingnya identitas kependudukan berupa e-KTP, nah kami dari pihak Dinas Dukcapil terus melakukan sosialisasi pada masyarakat akan pentinya hal itu, nah dalam beberapa kesempatan sosialisasi yang kami lakukan, antusiam masyarakat dalam memberikan saran dan ide itu memang terlihat, misalnya masyarakat meminta kami dari Dinas Dukcapil untuk lebih intens turun ke lingkungan masyarakat atau melalui pemerintah kelurahan setempat dalam rangka membantu masyarakat dalam pengurusan e-KTP, ide dan gagasan ini bagi kami adalah hal yang sangat baik, artinya ada masyarakat turut langsung berpartisipasi dalam hal upaya kami untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya e-KTP” (Wawancara, 11 Oktober 2024)

Ditambahkannya bahwa :

“Untuk keterlibatan masyarakat secara sadar berpartisipasi mengurus e-KTP salama ini memang masih kurang dan menjadi perhatian kami, angka masyarakat yang belum mengurus itu cukup tinggi, kami terus berupaya agar masyarakat dapat dilayani dengang baik dan sadar untuk melaukan pengurusan e-KTP sebagai identitas diri mereka” (Wawancara, 11 Oktober 2024).

Hal yang sama disampaikan oleh salah kepala bagian pelayanan pada Dinas Dukcapil Kota Gorontalo terkait partisipasi masyarakat pada pengurusan e-KTP, khususnya berkaitan dengan partisipasi dalam bentuk ide atau gagasan yang menyebutkan bahwa :

“Pada beberapa kesempatan memang masyarakat yang datang mengurus e-KTP di kantor Dukcapil selalu mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk edukasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil, khususnya berkaitan dengan kegiatan langsung dimasyarakat, nah masyarakat datang memberikan saran atau ada usulan yang disampaikan misalnya kami diminta tidak hanya menunggu masyarakat datang secara pribadi, namun harus rajin turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan hal-hal terkait e-KTP ini, sehingga akan muncul kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pengurusan e-KTP” (Wawancara 12 Oktober 2024).

Dalam kesempatan lainnya peneliti kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat yang datang melakukan pengurusan e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa :

“Saya pribadi menyampaikan ke petugas saat pengurusan e-KTP bahwa sebaiknya pemerintah turun langsung ke bawah untuk sosialisasikan ke amsyarakat mengenai pentingnya mengurus e-KTP, kenapa karena memang warga ini kalau hanya ditunggu mengurus sendiri itu sesuatu yang tidak mungkin, mereka itu mengurus jika ada keperluan lain yang membutuhkan KTP, padahal KTP ini sangat

penting. Dilain sisi memang untuk warga disekitar lingkungan tempat tingga; saya juga ada beberapa yang juga belum memiliki e-KTP” (Wawancara, Oktober 2024).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama masyarakat lainnya yang datang melakukan pengurusan e-KTP menjelaskan bahwa :

“Saya sendiri secara insisiatif pribadi turut serta memberikan informasi kepada tetangga saya dirumah dan beberapa teman saya tentang layanan e-KTP dan pentingnya pengurusannya, bahwakan saya arahkan mereka pergi melakukan pengurusan, ini bagian dari respon saya pada kebutuhan idientitas diri ini. Karena mereka pasti butuh itu dan saya merasa terpanggil untuk melakukan itu sebagai bentuk partisipasi saya” (Wawancara, Oktober 2024).

Sejalan dengan pernyataan salah satu masyarakat tersebut diatas, terdapat pernyataan yang sama dari warga lain yang juga datang mengurus e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa :

“Saya datang mengurus e-KTP ini setelah didorong oleh saudara saya dirumah dan diberikan penjelasan kepada saya tentang pentingnya mengurus e-KTP sebagai identitas kependudukan saya, memang saya datang kesini untuk mengurus karena ada kepentingan saya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, sehingga saya tersadarkan untuk mengurusnya” (Wawancara, Oktober 20024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Dukcapil sebagai operator e-KTP yang menjelaskan bahwa :

“Alhamdulillah masyarakat Kota Gorontalo ada juga yang memberikan masukan akan kualitas layanan untuk pengurusan e-KTP ini, mulai dari persyararatannya, Model perekaman saat e-KTP, lamanya mereka harus menunggu e-KTP yang asli kartunya bukan hanya menggunakan suket saja, dan hal-hal lain yang sifatnya masukan” (Wawancara Oktober 2024).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurusan e-KTP dalam bentuk partisipasi berupa ide atau gagasan dapat dilihat pada beberapa hal yang ditemukan seperti halnya adanya saran yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung untuk pemerintah, khususnya Dinas DUKcapil melakukan upaya konkret dengan mengudakasi masyarakat secara langsung dengan mendatangi, mem sosialisasikan akan pentingnya e-KTP sebagai identitas diri mereka. Parstisipasi ide dan gagasan ini menjadi hal yang dilakukan oleh masyarakat, diaman dalam temuan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat masyuarakat yang juga turut serta menyampaikan layanan e-KTP kepada masyarakat lain agar mengurus e-KTP sebagai identitas mereka. Konsep partisipasi berupa ide dan gagasan ini oleh beberapa masyarakat di Kota Gorontalo kemudian diimplementasikan baik melalui media social, maupun penyampaikan secara langsung kepada Dinas Dukcapil Kota Gorontalo.

4.2.2 Partisipasi Dalam Bentuk Fisik Atau Tenaga

Partisipasi dalam bentuk fisik atau tenaga yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah keterlibatan masyarakat langsung dalam pengurusan e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo, maka peneliti melakukan wawancara bersama beberapa informan yang dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait sub fokus yang diteliti. Beberapa hasil wawancara tersbut diantaranya :

Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Dukcapil Kota Gorontalo menjelaskan terkait keterlibatan masyarakat secara langsung, yaitu :

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan e-KTP ini sejak tahun 2023 memang mengalami penurunan seiring dengan jumlah penduduk Kota Gorontalo yang semakin meningkat, baik dari sisi populasi jumlah dari peralihan batas usia minimal, maupun warga masyarakat yang datang pindah domisili dari daerah lain atau diantra wilayah yang ada di Kota Gorontalo. Trend kesadaran masyarakat ini memang saat ini kami upayakan terus mengalami peningkatan, artinya kami berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta mengurus e-KTP secara sadar dan tampa harus melihat ketika ada kepentingan lain dulu baru mau mengurus, sementara e-KTP ini kan identitas wajib masyarakat. Saat ini memang masyarakat yang datang mengurus e_KTP itu memang terlihat, artinya terdapat juga sebagian besar masyarakat yang secara sadar datang mengurus e-KTP, namun itu masih belum sesuai dengan target kami, dimana

semua masyarakat yang sudah wajib memiliki e-KTP harus sudah memiliki identitas kependudukan tersebut” (Wawancara, 14 Oktober 2024).

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Dukcapil tersebut, Kepala Bagian layanan umum Dinas Dukcapil Kota Gorontalo juga saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa :

“Masyarakat saat ini memang perlu untuk disadarkan melalui edukasi terus menerus datang mengurus identitas diri mereka, memang saat ini itu masih menjadi tantangan tersendiri buat kami, karena masih banyak juga masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dan datang melakukan pengurusan e-KTP. Sekalipun memang saat ini terlihat kesadaran itu juga sudah ada, sehingga yang dapat ke Dinas Dukcapil juga mulai banyak. (Wawancara, 14 Oktober 2024).

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama masyarakat yang datang melakukan pengurusan e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo, salah satu masyarakat menjelaskan bahwa :

“Saya datang melakukan pengurusan e_KTP ini sebagai bentuk kesadaran saya akan identitas kependudukan saya dan tentu sebagai bentuk partisipasi langsung saya dalam rangka mensukseskan program dari Dinas Dukcapil dalam data kependudukan masyarakat Kota Gorontalo, saya juga mengajak beberapa teman dan saudara

saya yang belum memiliki e_KTP sehingga sama – sama mereka memiliki KTP” (Wawancara 15 Oktober 2024).

Hal yang sama diungkapkan oleh masyarakat lainnya yang sempat diwawancarai oleh peneliti terkait partisipasi langsung berupa fisik mendatangi Dinas Dukcapil yang menjelaskan bahwa :

“Saya datang mengurus e-KTP ini adalah bagian dari komitmen saya secara pribadi untuk mengurus semua identitas diri dan keluarga saya, karena ini penting menurut saya, mengingat banyak hal nanti urusan saya itu yang pada dasarnya memerlukan KTP, mau urus apa harus ada KTP kalau tidak yang tidak bisa, maka secara sadar saya datang mengurus” (Wawancara, 15 Oktober 2024).

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai masyarakat lain yang datang mengurus e_KTP yang menjelaskan bahwa :

“Saya ini warga dari Kelurahan Pohe, datang kesini mengurus e-KTP karena memang saya butuh, sudah meminta pengantar dari kelurahan, berharap kedepan pihak pemerintah untuk mempermudah kami dalam pengurusan KTP ini, misalnya penyediaan sarana dan prasarana layanan e-KTP, ketersediaan kartu e-KTP, serta kalau bisa ada layanan jemput bola pengrususan langsung ke masyarakat” (Wawancara 15 Oktober 2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama kepala bagian layanan di Dinas DUkcapil Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa :

“Pelayanan bagi masyarakat di Dinas Dukcapil ini sudah diupayakan semaksimal mungkin memberikan rasa nyaman dan cepat dalam proses pengurusan, sehingga dengan itu kami berharap ada partisipasi aktif masyarakat secara langsung datang melakukan pengurusan e-KTP, memang ada beberapa keluhan yang muncul misalnya sarana dan prasarana yang kurang, operator yang terbatas, serta lebih penting itu ada masalah ketersediaan kartu e-KTP sehingga setelah masyarakat datang bisa langsung memiliki e-KTP tidak lagi menggunakan surat keterangan biasa pengganti KTP, namun memang terlihat masyarakat secara sadar sudah banyak yang datang melakukan pengurusan e-KTP ini tentu adalah hal yang baik, karena terlihat ada partisipasi aktif masyarakat secara langsung ikut melakukan pengurusan e-KTP” (Wawancara 16 Oktober 2024).

Sejalan dengan pernyataan tersebut diatas, kemduian peneliti melakukan wawancara bersama salah satu pegawai operator di Dinas Dukcapil Gorontalo yang mempertanyakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan e-KTP, yang menyebutkan bahwa :

“Pelayanan bagi masyarakat yang datang saya sebagai operator langsung melihat sudah cukup baik, karena sudah banyak yang datang melakukan pengurusan secara langsung, bahkan ada beberapa warga masyarakat yang mengenal saya itu langsung menelpon untuk mempertanyakan layanan e-KTP dan saya jelaskan sebainya datang langsung ke Dinas Dukcapil dan akan dilakukan perekaman secara

langsung, sehingga bisa cepat memperoleh e-KTP. Ini sudah menjadi komitmen kami. Nampak memang masyarakat yang datang mengurus itu karena ada kebutuhan mereka ditempat lain yang membutuhkan KTP, bagi saya menilainya itu hal yang wajar dan baik, artinya da keinginan masyarakat untuk mengurusnya” (Wawancara 16 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik atau secara langsung melakukan perekaman e-KTP atau pengurusan KTp di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo terlihat bahwa secara umum masyarakat ikut serta secara langsung melakukan pengurusan. Atunsiasme masyarakat tersebut terlihat dari beberapa masyarakat yang datang mengurus dan mengajak sadauara atau warga lain datang bersama melakukan pengurusan, hal ini juga diperkuat oleh adalah kebijakan layanan yang dianggap memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengurus. Keterbatasan fasilitas layanan berupa kartu e-KTP yang juga kurang serta sarana dan prasarana layanan lainnya juga menjadi fakta akan pentingnya layanan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat secara langsung. Hal diatas juga diperkuat dengan pengataman yang dilakukan oleh peneliti melalui peneltian secara langsung saat di Dinsa Dukcapil, dimana jumlah masyarakat yang datang melakukan pengurusan juga terlihat oleh peneliti, ada yang datang karena mereka berusia 17 tahun ada juga masyarakat yang melakukan pengurusan klarena pidah domisi, serta keperluan lainnya yang memerlukan KTP.

4.3 Pembahasan

Partisipasi adalah hal penting dan menjadi bagian penentu dari pembangunan dalam satu daerah. Keterlibatan publik dalam semua proses pembangunan menjadi konsekuensi mutlak akan pembangunan yang berkelanjutan dalam satu wilayah, mengingat otonomi daerah telah memberikan ruang keterlibatan publik secara aktif dalam semua proses yang dilaluinya. Adanya data kependudukan yang terupdate dan terintegritas dapat menjadi patron penentu dari pemerintah daerah untuk melakukan perumusan kebijakan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidupnya.

Identitas kependudukan berupa e-KTP adalah bagian penting dari indikator keberhasilan pemerintah dalam melakukan pengakumulasiyan identitas warga masyarakatnya yang dengan itu akan ada parameter jelas dari pemerintah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Problematika partisipasi publik dalam pengurusan identitas kependudukan telah menjadi catatan penting dari kurang maksimalnya upaya-upaya pemerintah untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan e-KTP.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memfokuskan pada partisipasi masyarakat yang dilihat pada dua pendekatan yaitu, partisipasi dalam bentuk ide dan gagasan, serta partisipasi dalam bentuk fisik atau secara langsung datang melakukan pengurusan e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo. Temuan penelitian berkaitan dengan partisipasi masyarakat

dalam hal ide dan gagasan lebih menunjukan pada aspek keterlibatan pada pemberian saran kepada Dinas Dukcapil untuk lebih bisa aktif dalam mengedukasi masyarakat guna secara sadar datang melakukan pengurusan e-KTP, serta keterlibatan dalam upaya mengajak masyarakat lainnya untuk turut serta peduli melakukan pengurusan e-KTP. Partisipasi berupa ide dan gagasan adalah bagian penting dari upaya keterlibatan masyarakat dalam memberikan catatan penilaian terhadap kualitas layanan dari Dinas Dukcapil, serta bagian dari kontribusi masyarakat akan pelaksanaan kebijakan program pemerintah, khususnya berkaitan dengan masalah data kependudukan. Selain itu pendekatan lain yang dinilai dalam penelitian ini adalah berupa partisipasi aktif masyarakat berupa fisik atau secara langsung datang melakukan pengurusan e-KTP. Hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas menunjukan bahwa masyarakat turut serta melakukan upaya secara langsung datang mengurus e-KTP di Dinas Dukcapil dengan penuh kesadaran. Proses keterlibatan secara langsung adalah proses penting yang harus dilakukan mengingat tidak semua masyarakat akan bisa secara sadar melakukannya.

Huraerah dikutip oleh Alfitri (2018:38) mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri, menyeleksi alternatif tindakan atau program dan mengimplementasikan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi program.

Partisipasi tidak terbatas pada ruang ide atau gagasan saja, namun lebih dari itu partisipasi penting untuk dilihat pada aspek yang berkaitan dengan peran secara langsung untuk terlibat melakukan kegiatan secara langsung pada suatu kegiatan dilapangan. Tantangan pemerintah daerah, khususnya Dinas Dukcapil Kota Gorontalo adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk secara langsung berpartisipasi dalam pengurusan e-KTP. Mengapa demikian karena Dinas Dukcapil Kota Gorontalo adalah lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengakumulasikan seluruh kebutuhan data kependudukan yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, baik yang bersifat infrastruktur, maupun pembangunan manusiannya.

Fokus dari pemerintah untuk memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi pengurusan e-KTP adalah pada dua pendekatan sebagaimana sub fokus dalam penelitian ini, yaitu partisipasi ide atau gagasan dan partisipasi dalam bentuk fisik atau secara langsung. Davis dalam jurnal yang ditulis oleh AnthoniusIbori (2013) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa bentuk partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan dan Partisipasi dalam bentuk tenaga.

Edukasi yang berkelanjutan bagi masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat agar dapat memberikan kesadaran dan motivasi untuk melakukan pengurusan e-KTP sebagai identitasnya. Keterlibatan masyarakat secara sadar akan memberikan kemudahan dalam proses layanan identitas kependudukan di Dinas Dukcapil yang tentu harus dibarengi dengan

upaya maksimal dari pemerintah untuk menyiapkan segala hal yang menjadi sarana dan prasarana dalam proses layanan penduduk.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perekaman e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo bahwa partisipasi yang terlihat dalam fakta penelitian, dimana masyarakat turut serta dalam memberikan ide atau gagasan yang teraktualisasikan dalam bentuk saran dan pendapat yang diebrikan kepada pihak Dinas Dukcapil. Dimana saran dan pendapat itu berupa harapan yang disampaikan kepada Dinas Dukcapil agar terus melakukan upaya edukasi secara massif yang dapat memberikan kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP sebagai wujud dari kepedulian atas identitas kependudukan mereka yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, selain itu partisipasi juga terkihat pada saat pengurusan langsung e-KTP di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo, dimana adanya masyarakat yang hadir secara suka rela dan sadar untuk melakukan perekaman e-KTP yang dalam kesempatan yang sama juga diakui oleh pejabat setempat. Selain itu proses pengurusan atau perekaman e-KTP juga dinilai belum maksimal dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang dapat memberikan kepuasan serta motivasi bagi masyarakat yang akan datang melakukan perekaman e-KTP

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah pentingnya kebijakan yang sifatnya dapat merubah pemikiran masyarakat tentang pentingnya identitas kependudukan e-KTP yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Dukcapil melalui kegiatan-kegiatan intens langsung kemasyarakatan, baik dalam bentuk sosialisasi atau pendampingan secara langsung layanan pengurusan e-KTP dalam artian melakukan pola jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat yang belum melakukan peremakan e-KTP, serta mengupayakan pembukaan layanan peerekaman e-KTP langsung dilingkungan masyarakat dengan system layanan berjalan yang dapat memfasilitasi langsung masyarakat. Dilain sisi pentingnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana layanan e-KTP di Dinas Dukcapil yang dapat memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam layanan kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan kepuasan atas layanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha ilmu Yogyakarta
- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., ... & Oktaviani, E. (2024). *Membangun Desa Dengan Revolusi Digital*. Mega Press Nusantara.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta
- Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, d. M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih. Kawistara, 3, 131
- Dwiningrum, S.I.A. 2015. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziyah, F. F. (2023). *Meningkatkan Efektivitas Kinerja Asn Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ibori Anthonius (2013), Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni.
- Kogoya, Teraik dkk. (2015). "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua" dalam "jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi" volume 15 nomor 2.
- Latifah, N., Ningsih, Y., & Assyahri, W. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari Di Sumatera Barat. *Journal Of Public Administration And Management Studies*, 2(2), 47-54.
- Mulyadi (2013). Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahtraan Sosial. Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Karya
- Newstrom, John W (2007), Perilaku dalam organisasi, Edisi 7, Jilid 1. Jakarta, erlangga
- Novitasari, A., & Iswara, U. S. (2024). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

- Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 13(6).
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jakarta. Erlangga.
- Saputri, J. (2024). Strategi Komunikasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Mensosialisasikan Pengurusan E-Ktp Pada Remaja (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5187-5202.
- Soetomo. (2008). Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soselisa, J. F. (2021). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Doctoral Dissertation, Ipdn Jatinangor).
- Suharto, Edi. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Bandung Alfabeta.
- Suwandi. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana desa Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Administrasi Negara. Vol 3 No 4.
- Wahyudi, Isa, 2008, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Malang Corruption Watch (MCW), SNA XIII.
- Zamroni, 2011. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4862/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Ramdan B. Amadu
NIM	:	S2120015
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian	:	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO
Judul Penelitian	:	ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 29 November 2023
Ketua



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Achmad Nadjamuddin (0435) 822161 Kota Gorontalo
 Email: dkps@gorontalokota.go.id Website: <https://disdukcapil.gorontalokota.go.id>

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 800/DUKCAPIL/ 1411

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama	:	YUSRIANTO KADIR, SE. M.Ec.Dev
NIP	:	19741206 20001 2 005
Jabatan	:	Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama	:	RAMDAN B. AMADU
Nim	:	S2120015
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo

Telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sejak Tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 05 November 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ ***ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO*** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk digunakan seperlunya

Gorontalo, 05 November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO,


YUSRIANTO KADIR, SE. M.Ec.Dev
 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
 NIP.19741206 20001 2 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo**

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 260/FISIP-UNISAN/S-BP/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SwastianiDunggio,S.I.P.,M.Si
NIDN	: 0930048307
Jabatan	: Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	: RAMDAN B. AMADU
NIM	: S2120015
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Prekeman kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar **23 %** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 30 November 2024
Tim Verifikasi,


Swastiani Dunggio, S.I.P.,M.Si
NIDN. 0930048307

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

CDDDDDDDDDDDDDDDDDD



Page 1 of 52 - Cover Page

Submission ID trn:oid::1:3101439644

FISIP02 Unisan

Ramdan Amadu Analisis partisipasi masyarakat dalam perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) Didinas ...

ILMU PEMERINTAHAN 1-2024

Fak. Ilmu Sosial & Politik

LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3101439644

48 Pages

Submission Date

Dec 4, 2024, 10:20 AM GMT+7

7,938 Words

Download Date

Dec 4, 2024, 10:28 AM GMT+7

54,030 Characters

File Name

Proposal_Ku.docx

File Size

77.2 KB



Page 1 of 52 - Cover Page

Submission ID trn:oid::1:3101439644



23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

0%	Internet sources
13%	Publications
22%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.





(Wawancara Pak Kadis)

Wawancara bersama kepala Dinas Dukcapil Kota Gorontalo tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan pada e-KTP



(Wawancara Ibu Kabid Pelayanan)

Wawancara bersama Ibu Kabid Dukcapil Kota Gorontalo tentang pengambilan data terkait perekaman e-KTP



(Wawancara pak koko Pegawai Perekaman e-KTP)

Wawancara bersama pak koko selaku pegawai perekaman e-ktp Dukcapil
Kota Gorontalo tentang percetakan e-KTP



(Wawancara Masyarakat)

Wawancara masyarakat yang belum membuat e-KTP baru, Saudara Kelvin
memiliki kendala dalam pembuatan KTP baru dikarena KTP sebelumnya hilang.



(Wawancara Masyarakat)

Wawancara masyarakat yang sudah rusak e-KTP, Saudara Mamat memiliki kendala dalam pembuatan KTP baru dikarena akses jalan yang jauh dari lokasi tempat tinggal.



(Wawancara Masyarakat)

Wawancara masyarakat yang belum membuat e-KTP, Saudari Yanti memiliki kendala dalam pembuatan KTP dikarenakan belum mengetahui persyaratan/prosedur pembuatan KTP.

CURICULUM VITAE

a. Identitas pribadi

Nama : Ramdan B. Amadu
 NIM : S2120015
 Fakultas : Ilmu sosial & ilmu politik
 Program studi : Ilmu pemerintahan



Tempat tanggal lahir : Dulomo, 19 Desember 2000

Nama orang Tua

a. Ayah : Alm. Burdin M. Amadu
 b. Ibu : Ningsih Djibu

Saudara

Adik : Fitriyanti B. Amadu

b. riwayat pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2007 – 2013	SDN 1 DULOMO	DESA DULOMO	Berijazah
2	2013 – 2016	SMPN 2 TELAGA	TELAGA	Berijazah
3	2016 – 2019	SMK GOTONG ROYONG GORONTALO	JLN.RAMBUTAN	Berijazah
4	2020 - 2024	FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK	UNISAN GORONTALO	Berijazah

c. Pengalaman organisasi

- ✓ Ketua Bidang Pengembangan organisasi Himpunan Mahasiswa program studi ilmu pemerintahan (HMPIP) Periode 2021 - 2022